



RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2027



bpbddkijakarta



<https://bpbd.jakarta.go.id/>



Jl. K.H. Zainul Arifin No. 71 Kel.
Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta
Pusat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Secara substansi, dokumen Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027 secara efektif, efisien, akuntabel. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan dinamika kebijakan dan pembangunan. Oleh karena itu, masukan dan saran tetap kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, Juli 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta



MARULITUA
NIP. 197510191994121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA KERJA BPBD PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2027

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan seluruh kegiatan terkait mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di wilayah DKI Jakarta ini mempunyai visi

“Ketangguhan Kota Jakarta dalam Menghadapi Bencana”

BPBD juga mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's), yaitu tujuan “tanpa kemiskinan”, tujuan “menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan” dan tujuan “mengambil tindakan cepat untuk perubahan iklim dan dampaknya”.

Target Tujuan/Sasaran

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renja BPBD	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan Indikator: Penurunan Emisi GRK	Tujuan: Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,65	0,68	0,72	0,74	0,76
2	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim Indikator: Indeks Risiko Bencana	Sasaran: Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	100	100	100	100	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	17
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III	3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3
1. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.....	3
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).....	4
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	5
3.3 Program dan Kegiatan/Subkegiatan	7
BAB IV	9
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	9
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027	9
BAB V	3
PENUTUP	3

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud & Tujuan, Sistematika
Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penyusunan Renja BPBD dilaksanakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2027. Selain itu, penyusunan Renja juga memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasi dengan Renstra BPBD, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

■ Dalam penyusunannya, Renja BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, target

kinerja Tahun 2027 dalam Renstra BPBD Tahun 2025–2029, serta penelaahan terhadap kebijakan nasional. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sehingga menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2027;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXXV tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001/SE/2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2027 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana operasional tahunan;

2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Merujuk pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Prioritas Utama Pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan penanggulangan banjir melalui pemantapan infrastruktur pengendali banjir, peningkatan upaya pencegahan, serta optimalisasi penanganan pasca banjir guna mendukung ketahanan wilayah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2026

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2026 (n-1); pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya; analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi nama Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027, disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, serta pagu indikatif pendanaan, sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025 dan perkiraan capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2026. Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan, isu-isu strategis, program, dan kegiatan Renja BPBD Tahun 2025. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027. Struktur, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan mengacu pada Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2026. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 menunjukkan realisasi atas indikator program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2025 serta proyeksi capaian indikator program pada 2026. Adapun informasi dalam tabel untuk realisasi capaian kinerja pada tahun 2026 sudah merujuk pada target Renstra baru yaitu Renstra BPBD Tahun 2025-2029. Berikut Adalah penjelasan singkat dari tabel 2.1:

- Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh program dan kegiatannya sebesar Rp. 176.601.769.469,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 161.973.924.558,- atau 91,72%. Pada tahun 2025 terdapat 2

(dua) program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penanggulangan Bencana BPBD memiliki 6 (enam) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD memiliki 7 (Tujuh) Kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan.
 - Program Penanggulangan Bencana UPT PDIK memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PDIK memiliki 6 (enam) Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan.
- Seluruh capaian indikator program BPBD secara umum telah masuk kategori Sangat Tinggi dengan kisaran capaian sebesar 100% hingga 126% dengan seluruh target indikator telah tercapai dengan baik dan capaian kinerja telah melampaui dari target.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (sampai dengan Tahun 2025)

[illegible]

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	7100	1000	1000	100%	6094	6094	100%	
BPBD	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah aparaturnya, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB	4940	6787	6787	100%	5000	5000	100%	
BPBD	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10	5	5	100%	5	5	100%	
BPBD	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalisasi dan	1	1	1	100%	1	1	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana								
BPBD	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	60	40	40	100%	60	60	100%	
BPBD	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (kepmen)	7075	1530	1530	100%	4330	4330	100%	
BPBD	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	4	1	1	100%	1 dokumen	1	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	48	12	12	100%	12	12	100%	
BPBD	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4	1	1	100%	12	12	100%	
BPBD	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	379.912	29.884	29.884	100%	3500	3500	100%	
BPBD	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	
BPBD	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan	4	1	1	100%	1 dokumen	1	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun								
BPBD	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	28	28	28	100	22	22	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (kepmen)	1	4	4	100%	N/A	N/A	N/A	
BPBD	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	4	1	1	100%	N/A	N/A	N/A	
BPBD	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
BPBD	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100%	100	100	100%	
BPBD	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	100%	2	2	100%	
BPBD	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	59	59	100%	83	83	100%	
BPBD	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	4	4	4	100%	4	4	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
BPBD	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	100%	1	1	100%	
BPBD	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	100%	1	1	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (kepmen)	1	2	2	100%	1	1	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (kepmen)	1	1	1	100%	1	1	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (kepmen)	1	2	2	100%	1	1	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	1	1	100%	2	2	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kepmen)	4	12	12	100%	12	12	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (kepmen)	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	100%	1	1	N/A	
BPBD	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	5	5	100%	7	7	100%	
BPBD	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	64	64	100%	64	64	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	25	25	100%	14	14	100%	
UPT PDIK	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
UPT PDIK	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
UPT PDIK	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
UPT PDIK	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	100%	4	4	100%	Target renstra dilaksanakan di tiap Triwulan
UPT PDIK	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4	4	4	100%	4	4	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	3	3	100%	1	1	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2	1	1	100%	1	1	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	2	2	2	100%	2	2	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2	2	2	100%	2	2	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	2	1	1	100%	2	2	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	4	100%	4	4	100%	Target renstra dilaksanakan di tiap Triwulan
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	4	4	4	100%	4	4	100%	Target rencana kerja dilaksanakan di tiap Triwulan

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	N/A	4	4	100%	N/A	N/A	N/A	
UPT PDIK	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	4	100%	4	4	N/A	
UPT PDIK	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	N/A	52	52	100%	N/A	N/A	N/A	
UPT PDIK	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	12	12	100%	12	12	100%	Target renstra dilaksanakan tiap bulan
UPT PDIK	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	4	100%	55	55	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	5	5	5	100%	5	5	100%	Target rencana kerja disesuaikan dengan jumlah KDO pada UKPD
UPT PDIK	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50	50	50	100%	80	80	100%	Target rencana kerja disesuaikan dengan jumlah peralatan/mesin lainnya yang dipelihara UKPD
UPT PDIK	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
UPT PDIK	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Kelurahan Yang Diberikan Informasi Rawan Bencana.	100	100	100	100%	100	100	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Dan Aparatur Di Kawasan Risiko Tinggi Bencana Lintas Kabupaten/Kota Yang Menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana (Per Jenis Ancaman) Lintas Kabupaten/Kota	1000	1000	1000	100%	1000	1000	100%	- Realisasi untuk mendukung capaian target rencana kerja Perangkat Daerah - Terdapat perubahan indikator kinerja sub kegiatan
UPT PDIK	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	N/A	200	200	100%	N/A	N/A	N/A	
UPT PDIK	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Dan Aparatur Di Kawasan Risiko Tinggi Bencana Lintas Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Kemampuan Dan Ketrampilannya	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2027	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2026	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Dalam Pencegahan Dan Mitigasi Bencana								
UPT PDIK	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Yang Disusun Tepat Waktu	100	100	100	100%	100	100	100%	
UPT PDIK	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Dan Jenis Data Dan Informasi Kebencanaan Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	12	12	12	100%	12	12	100%	Sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan oleh UKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, analisis capaian kinerja perangkat daerah dapat dilakukan dengan melihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari Indikator Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Tabel 2.2 di bawah memuat capaian kinerja pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya.

Capaian target Indeks Ketahanan Daerah terealisasi dengan sangat baik yaitu 0,64 dari target nilai 0,61. Indikator ini merupakan indikator yang mengukur kapasitas ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. Pendekatan tingkat ketahanan daerah diukur berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sedangkan realisasi Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana juga terealisasi dengan sangat baik yaitu mencapai 100% dari target 100%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, didapatkan definisi operasional Persentase capaian pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana yang meliputi 3 aspek, yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sesuai jenis dan mutu SPM berdasarkan peraturan yang berlaku. Capaian SPM dihitung atas 3 Kegiatan yang mencakup 12 Sub Kegiatan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur

organisasi. BPBD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terdiri dari fase pra bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan fase pasca bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase prabencana/fase tidak terjadi bencana difokuskan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pelatihan, pembinaan dan simulasi penanggulangan bencana bagi siswa dan masyarakat, relawan serta aparatur, serta penyediaan sarana prasarana *early warning system* melalui UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana difokuskan pada upaya untuk melakukan: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta kebutuhan warga terdampak; koordinasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase pasca bencana difokuskan pada 2 (dua) upaya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cakupan pelayanan assessment penilaian kerusakan, pendampingan masyarakat melalui koordinasi pemulihan sosial dan ekonomi; pemulihan pelayanan kesehatan; pemulihan dan budaya; pemulihan fungsi pelayanan publik; serta mengkoordinasikan pembangunan kembali prasarana dan sarana.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	
1	Sub Urusan Bencana	Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dilaksanakan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis, kementerian/lembaga, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat, sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif penanggulangan bencana.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 dan Renstra BPBD 2025–2029, fokus penanggulangan bencana diarahkan pada penguatan ketahanan wilayah terhadap banjir dan bencana hidrometeorologi dan peningkatan kualitas layanan kebencanaan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD diantaranya yaitu :

1. Tingginya risiko banjir dan bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan keterbatasan daya dukung lingkungan, dengan kecenderungan pergeseran lokasi rawan bencana.
2. Belum optimalnya integrasi sistem penanggulangan bencana lintas OPD, khususnya pada fase kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
3. Penguatan sistem komando dan koordinasi lapangan masih menghadapi tantangan ego sektoral pada kondisi darurat.
4. Keterbatasan kapasitas SDM kebencanaan, baik aparatur maupun masyarakat, terutama pada aspek teknis tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
5. Belum meratanya sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana, termasuk fasilitas evakuasi dan perlindungan masyarakat.

6. Belum sepenuhnya terintegrasinya data dan informasi kebencanaan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan respons cepat.
7. Peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi masih bersifat koordinatif, sementara pelaksanaan fisik berada pada OPD teknis, sehingga membutuhkan sinkronisasi perencanaan yang lebih kuat.
8. Penanganan banjir masih terbatas pada koordinasi internal Provinsi DKI Jakarta, padahal hidrologi banjir Jakarta juga dipengaruhi wilayah hulu Jabodetabek, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas wilayah/lintas provinsi.

BPBD juga mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu tujuan “tanpa kemiskinan”, tujuan “menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan” dan tujuan “mengambil tindakan cepat untuk perubahan iklim dan dampaknya”. Implementasi dukungan terhadap TPB/SDGs tersebut tercermin dalam target dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
2. Ketahanan kota terhadap banjir & bencana hidrometeorologi
3. Penguatan layanan dasar kebencanaan (SPM)
4. Pengurangan risiko berbasis wilayah
5. Integrasi sistem data dan peringatan dini
6. Perlindungan kelompok rentan, termasuk disabilitas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD terdapat tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu :

● Tantangan :

1. Masih rendahnya literasi kesadaran dan pemahaman masyarakat perkotaan tentang risiko bencana dan pengurangan risiko bencana.
2. Terbatasnya kewenangan lembaga dan penggiat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana.
3. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih bersifat sektoral.
4. Masih rendahnya kemampuan petugas pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

5. Masih rendahnya pemahaman SKPD teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 6. Kapasitas teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana yang belum merata.
 7. Kompleksitas risiko bencana akibat kepadatan wilayah dan infrastruktur.
 8. Belum seluruhnya pengelola gedung memahami pengurangan risiko bencana gedung bertingkat.
 9. Meningkatnya ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan pesisir utara Jakarta akibat pengambilan air tanah berlebihan dan kenaikan permukaan laut, yang memerlukan strategi mitigasi tersendiri di luar penanganan banjir hidrometeorologi biasa.
- Peluang
 1. Perilaku masyarakat yang masih bersifat gotong royong dan mudah diarahkan.
 2. Tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran penggiat bencana dalam penanggulangan bencana.
 3. Dukungan APBD untuk penguatan kapasitas dan sistem kebencanaan.
 4. Adanya komitmen SKPD untuk melakukan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
 5. Tersedianya APBD dan komitmen SKPD dalam mengintegrasikan sistem informasi data.
 6. Tersedianya APBD dan SDM teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana.
 7. Kepedulian stakeholder dalam penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca bencana.
 8. Adanya update informasi pergeseran titik rawan bencana dari aparat kelurahan.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPBD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan integrasi lintas OPD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pengendalian banjir dan bencana hidrometeorologi.
2. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap banjir rob dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir utara Jakarta.
3. Peningkatan ketangguhan masyarakat melalui pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan wilayah.
4. Penguatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam seluruh siklus kebencanaan (pra, saat, dan pasca bencana).
5. Pengembangan sistem data dan informasi kebencanaan terintegrasi, termasuk penguatan diseminasi peringatan dini kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, sebagai dasar perencanaan dan respons cepat.
6. Penguatan peran BPBD dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dilakukan melalui proses pencermatan dan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta. Analisis kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian kinerja Tahun 2026, target Renstra BPBD Tahun 2025–2029, isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

Selanjutnya dilakukan sinkronisasi terhadap program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan riil penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa program dan

kegiatan BPBD telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mendukung pencapaian sasaran RPJMD, memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang kebencanaan, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil review menunjukkan bahwa secara umum program, kegiatan, dan subkegiatan yang terdapat pada Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana.

Namun demikian, berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan pembahasan lintas perangkat daerah dilakukan beberapa penyempurnaan, antara lain:

- penyesuaian target kinerja pada beberapa indikator agar lebih realistis sesuai proyeksi capaian tahun sebelumnya;
- penyempurnaan pagu indikatif pada beberapa kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan pertimbangan efisiensi
- penyesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan edukasi kebencanaan berdasarkan tingkat risiko bencana;
- penyesuaian kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana sesuai hasil inventarisasi aset dan kebutuhan operasional.

Perubahan tersebut tidak mengubah struktur program utama BPBD, namun lebih diarahkan pada penyempurnaan target, lokasi, dan besaran anggaran agar pelaksanaan Renja Tahun 2027 menjadi lebih efektif.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Program Penanggulangan Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan PB; Persentase pendampingan pascabencana; Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasar dalam 1×24 jam	2,06; 100%; 100%	48.977.354.273	Program Penanggulangan Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan PB; Persentase pendampingan pascabencana; Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasar dalam 1×24 jam	Tetap	48.056.248.652	Dipertahankan untuk mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Bencana serta sasaran RPJMD.
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana	100%	5.548.659.127	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana	Tetap	4.936.719.257	Tidak terdapat perubahan substansi kegiatan.
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat yang meningkat kapasitasnya	4.940 orang	33.448.051.767	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat yang meningkat kapasitasnya	Tetap	34.993.311.963	Dipertahankan dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, aparatur, dan kesiapsiagaan wilayah.
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	6.451.937.995	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tetap	5.253.454.944	Dipertahankan untuk menjamin pelayanan penyelamatan dan distribusi logistik pada saat tanggap darurat.

5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Persentase dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	100%	3.528.705.384	Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Persentase dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	Tetap	827.459.936	Dipertahankan untuk mendukung penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan penyelenggaraan pascabencana.
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Nilai	45.659.052.683	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	44.410.465.894	Dipertahankan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi, keuangan, SDM, serta pengelolaan barang milik daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027, Forum Perangkat Daerah, usulan Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi, aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan partisipatif, serta masukan dari pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, relawan kebencanaan, dan instansi terkait. Seluruh usulan kemudian diverifikasi berdasarkan kewenangan BPBD Provinsi DKI Jakarta serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPBD, terutama pada aspek:

- peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- peningkatan edukasi dan sosialisasi kebencanaan;
- penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan;
- peningkatan sistem informasi kebencanaan;
- peningkatan koordinasi penanganan darurat bencana.

Usulan yang sesuai dengan kewenangan BPBD diakomodasi ke dalam program dan kegiatan Tahun 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah. Sedangkan usulan yang berada di luar kewenangan BPBD diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang.

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Pemangku Kepentingan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berupa perahu karet, pelampung, tandu, dan alat evakuasi	Kelurahan Pondok Labu, Petogogan, Bintaro, Cilandak Timur, Marunda, Kuningan Barat, Mampang Prapatan	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang disediakan	20 Usulan	Diakomodasi sesuai kebutuhan wilayah rawan bencana dan kemampuan anggaran daerah.

2	Masyarakat	Pelatihan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan mitigasi bencana bagi masyarakat	Kelurahan Kebon Jeruk dan Menteng Dalam	Jumlah kegiatan pelatihan kebencanaan	2 usulan	Diakomodasi melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana.
3	Masyarakat	Penguatan sistem informasi kebencanaan, jalur evakuasi, sosialisasi, dan Kampung Tanggap Bencana	Kelurahan Kapuk Muara, Sunter Agung, Pejagalan, Pluit, Bangka	Jumlah kegiatan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan	5 usulan	Akan dikoordinasikan lebih lanjut sesuai kewenangan BPBD dan perangkat daerah terkait.
4	BNPB	Penyusunan dan pembaruan Kajian Risiko Bencana (KRB), peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya dokumen KRB dan meningkatnya IKD	1 dokumen	Menjadi masukan dalam penyusunan Renja untuk mendukung target RPJMD dan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.
5	Kementerian Dalam Negeri	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor, Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), penguatan SPM,	Provinsi DKI Jakarta	Terbentuknya TRC Multisektor dan meningkatnya koordinasi penanggulangan bencana	-	Menjadi rekomendasi strategis untuk penguatan kelembagaan BPBD dan koordinasi lintas sektor.
6	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Pelatihan kebencanaan bagi penyandang disabilitas, penyusunan modul kebencanaan inklusif, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan disabilitas	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelompok rentan	-	Diakomodasi melalui peningkatan kapasitas penyandang disabilitas
7	Wahana Visi Indonesia	Penguatan koordinasi Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana	Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya sinergi kelembagaan penanggulangan bencana	-	Menjadi masukan dalam penyempurnaan koordinasi program dan pendanaan lintas sektor.

BAB III

TUJUAN & SASARAN

PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat
Daerah, Program dan Kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Prioritas Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yaitu:

- a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
- b. terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
- c. terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman;
- d. terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
- e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
- f. terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
- g. terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
- h. terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat;
- i. terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
- j. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;
- k. terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana; dan
- l. terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana

Merujuk kepada prioritas tersebut, ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat pada sub urusan kebencanaan BPBD selaku OPD pelaksana kewenangan penanggulangan bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terutama pada prioritas pembangunan manusia, bentuk penjabaran pelaksanaan prioritas meliputi :

- Pelayanan informasi rawan bencana provinsi.
- Peningkatan kemampuan dan penanganan kebencanaan bagi : warga masyarakat, aparatur pemerintah serta siswa sekolah.
- Penguatan kapasitas dan Simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung.
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pendampingan Psikososial bagi masyarakat pasca Bencana.
- Peningkatan *early warning system* dan pelayanan kebencanaan.
- Pelayanan peningkatan literasi kebencanaan.
- Pelayanan pasca bencana termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan Jitupasna.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator.

Gambar 3.1

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)



keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs yaitu tujuan “tanpa

kemiskinan”, tujuan “menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan” dan tujuan “mengambil tindakan cepat untuk perubahan iklim dan dampaknya”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1 Program Penanggulangan Bencana
- 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 3 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi (KIE) dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
- 4 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 5 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 6 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 7 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
- 8 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 9 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 10 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- 11 Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana
- 12 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- 13 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 14 Penanganan Pasca Bencana Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027 merujuk kepada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD yang berkaitan langsung dengan BPBD sebagai pelaksana bidang penanggulangan bencana yaitu Tujuan 4.2 Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan dengan Sasaran 4.2.b yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renja BPBD	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan Indikator: Penurunan Emisi GRK	Tujuan: Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,65	0,68	0,72	0,74	0,76
2	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim Indikator: Indeks Risiko Bencana	Sasaran: Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	100	100	100	100	100

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tabel 3.1 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2027, maka prioritas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2027 antara lain:

1. Pelayanan informasi rawan bencana provinsi.
2. Peningkatan kemampuan dan penanganan kebencanaan bagi warga masyarakat, aparatur pemerintah serta siswa sekolah.
3. Penguatan kapasitas dan Simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung.
4. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
6. Penanganan pasca bencana, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan jitupasna.
7. Pendampingan Psikososial bagi masyarakat pasca bencana.
8. Peningkatan early warning system dan pelayanan kebencanaan.

3.3 Program dan Kegiatan/Subkegiatan

Program Renja 2027 terdiri 1 (satu) program utama dan 1 program operasional. Program tersebut yaitu:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2027 terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penanggulangan Bencana BPBD memiliki 4 (empat) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD memiliki 7 (tujuh) Kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan.
- Program Penanggulangan Bencana UPT PDIK memiliki 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PDIK memiliki 6 (enam) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan.

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Total anggaran Perencanaan Awal BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 sebesar Rp92.466.714.546, yang terdiri atas alokasi anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp89.403.472.430 dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (UPT PDIK) sebesar Rp3.063.242.116. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana, penguatan pelayanan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sistem informasi dan data kebencanaan yang terintegrasi.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 beserta rencana pendanaannya disajikan pada **Tabel 4.1**, yang memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta pagu indikatif untuk masing-masing unit pelaksana, yaitu BPBD Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (UPT PDIK).

Secara umum, rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah melalui penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pendanaan tersebut diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan tata kelola organisasi dan sistem informasi kebencanaan sehingga mampu mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih cepat, tepat, terintegrasi, dan akuntabel.

Adapun rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif Tahun 2027 sebagaimana dimaksud disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027
dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
BPBD	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
BPBD	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan PB	Provinsi DKI Jakarta	2,06	43.459.054.586	APBD		2,06	43.459.054.586
			Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana		100%				100%	
			Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam		100%				100%	

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.	Provinsi DKI Jakarta	100 persen	3.652.348.385	APBD		100 persen	3.652.348.385
BPBD	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	6.100 Orang	3.652.348.385	APBD		6.100 Orang	3.652.348.385
BPBD	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Provinsi DKI Jakarta	5.000 orang	34.993.311.963	APBD		5.000 orang	34.993.311.963
BPBD	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan	Provinsi DKI Jakarta	5 Kawasan	282.800.000	APBD		5 Kawasan	282.800.000

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana							
BPBD	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Provinsi DKI Jakarta	3.500 Orang	355.491.320	APBD		3.500 Orang	355.491.320
BPBD	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (kepmen)	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	271.812.920	APBD		1 Dokumen	271.812.920
BPBD	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Provinsi DKI Jakarta	60 Orang	311.894.080	APBD		60 Orang	311.894.080

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi DKI Jakarta	1.000 keluarga	4.023.202.042	APBD		1.000 keluarga	4.023.202.042
BPBD	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	27.645.903.898	APBD		1 Dokumen	27.645.903.898
BPBD	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi DKI Jakarta	5.080 Orang	2.102.207.703	APBD		5.080 Orang	2.102.207.703

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	100%	5.581.587.355	APBD		100%	5.253.454.944
BPBD	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	300.000.000	APBD		1 Laporan	50.400.000
BPBD	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	3.500 Orang	3.600.503.200	APBD		3.500 Orang	3.600.503.200
BPBD	1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	12.600 .000		1 Dokumen	12.600.000
BPBD	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	1.589.951.744	APBD		12 Laporan	1.589.951.744

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	Provinsi DKI Jakarta	100%	2.045.302.552	APBD		100%	2.045.302.552
BPBD	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1.176.142.336	APBD		1 Dokumen	1.176.142.336
BPBD	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial,	Provinsi DKI Jakarta	22 Lembaga	353.469.352	APBD		22 Lembaga	353.469.352

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal							
BPBD	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Provinsi DKI Jakarta	60 Orang	273.435.696	APBD		60 Orang	273.435.696
BPBD	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (kepmen)	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	200.255.168	APBD		1 Dokumen	200.255.168

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (kepmen)	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen	42.000.000	APBD		3 Dokumen	42.000.000
BPBD		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Provinsi DKI Jakarta			APBD			
BPBD	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Provinsi DKI Jakarta			APBD			

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai	39.165.247.409	APBD		4 nilai	43.459.054.586
BPBD	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	12.100.000	APBD		2 Dokumen	5.600.000
BPBD	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	6 Dokumen	11.450.000	APBD		2 Dokumen	5.600.000
BPBD	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai persepsi	35.015.745.059	APBD		4 nilai persepsi	39.239.627.900
BPBD	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	78 Orang /Bulan	35.005.745.059	APBD		78 Orang/ Bulan	39.239.627.900
BPBD	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 dokumen	10.000.000	APBD		2 dokumen	10.000.000
BPBD	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai persepsi	1.515.822.538	APBD		4 nilai persepsi	1.846.787.566

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	50.000.000	APBD		2 Paket	310.657.430
BPBD	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Paket	50.231.258	APBD		4 Paket	26.393.136
BPBD	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Paket	142.782.920	APBD		4 Paket	71.181.000
BPBD	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	5.253.360	APBD		1 Paket	10.241.280
BPBD	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Paket	1.083.522.835	APBD		4 Paket	1.216.074.240
BPBD	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan	68.000.000	APBD		8 Laporan	22.482.000
BPBD	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan	64.604.936	APBD		8 Laporan	158.968.000
BPBD	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen	51.427.229	APBD		4 Dokumen	30.790.480

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			Berbasis Elektronik pada SKPD							
BPBD	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai persepsi	644.276.323	APBD		4 nilai persepsi	637.710.080
BPBD	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	166 Unit	184.060.811	APBD		55 Unit	637.710.080
BPBD	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai Persepsi	699.652.256	APBD		4 Nilai Persepsi	272.315.904
BPBD	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan	100.000.000	APBD		8 Laporan	272.315.904
BPBD	1.05.01.1.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai persepsi	1.201.926.411	APBD		4 Nilai	1.447.013.136

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	78 Unit	1.017.865.600	APBD		78 Unit	1.413.808.496
BPBD	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	166 Unit	184.060.811	APBD		166 Unit	33.204.640
UPT PDIK	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
UPT PDIK	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi DKI Jakarta		951.411.308	APBD			951.411.308
UPT PDIK	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai Persepsi	178.047.344	APBD		4 Nilai Persepsi	178.047.344
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	93.434.320	APBD		2 Paket	93.434.320

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Paket	12.361.776	APBD		2 Paket	12.361.776
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	10.256.400	APBD		2 Paket	10.256.400
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	32.110.000	APBD		2 Paket	32.110.000
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	29.884.848	APBD		4 Laporan	29.884.848
UPT PDIK	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai Persepsi	24.219.552	APBD		4 Nilai Persepsi	24.219.552
UPT PDIK	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (kepmen)	Provinsi DKI Jakarta	17 unit	24.219.552	APBD		17 unit	24.219.552
UPT PDIK	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai Persepsi	678.424.128	APBD		4 Nilai Persepsi	678.424.128
UPT PDIK	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	628.834.560	APBD		12 Laporan	628.834.560

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			dan Listrik yang Disediakan							
UPT PDIK	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (kepmen)	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	49.589.568	APBD		4 Laporan	49.589.568
UPT PDIK	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai Persepsi	68.720.284	APBD		4 Nilai Persepsi	68.720.284
UPT PDIK	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	5 unit	43.091.772	APBD		5 unit	43.091.772
UPT PDIK	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	100 Unit	25.628.512	APBD		100 Unit	25.628.512
UPT PDIK	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA								

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
		PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
UPT PDIK	1.05.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Provinsi DKI Jakarta	APBD	2.111.830.808	APBD		APBD	2.111.830.808
UPT PDIK	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana	Provinsi DKI Jakarta	100 %	1.284.370.872	APBD		100 %	1.284.370.872
UPT PDIK	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (kepman)	Provinsi DKI Jakarta	1.000 Orang	1.284.370.872	APBD		1.000 Orang	1.284.370.872
UPT PDIK	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang	Provinsi DKI Jakarta	100%	827.459.936	APBD		100%	827.459.936

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			disusun tepat waktu							
UPT PDIK	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen	827.459.936	APBD		12 Dokumen	827.459.936

BAB V

PENUTUP

Penutup

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dan menjadi pedoman operasional pelaksanaan program serta kegiatan BPBD Tahun 2027. Renja ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana serta pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, dokumen ini akan melalui tahapan pembahasan dan penyempurnaan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penjangkaran aspirasi masyarakat, serta forum koordinasi lintas perangkat daerah. Proses tersebut dimaksudkan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

BPBD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana dengan mengedepankan sinergi multipihak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung upaya penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berdayaguna di DKI Jakarta.

Jakarta, Juli 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta



MARULITUA
NIP. 197510191994121001